Buletin Poltanesa Vol. 23 No. 2 (Desember 2022) p-ISSN 2721-5350 e-ISSN 2721-5369
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

Tata Kelola Program Vaksinasi Covid-19 Dalam Mengatasi Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19 Di DKI Jakarta dan Lampung Melalui Analisis Media Massa

Toddy Aditya *
Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, 15118
toddy.aditya08@gmail.com
*Corresponding author

Zulaihatin
Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, 15118
azulaihatin@gmail.com

Eqi Bayhaqi Rahman
Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, 15118
eqi_rahman@yahoo.com

Wiwi Ida
Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, 15118
sasabunda78@gmail.com

Abstrak— Mensukseskan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia memiliki tujuan yang penting dalam memcapai herd immunity, suksesnya program vaksinasi Covid-19 dapat dilihat dari tata kelola pemerintah dalam mendistribusikan vaksin di setiap daerah agar terhindar ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 di DKI Jakarta dan Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintah dapat mengatasi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 di setiap daerah. Demikian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif pada aplikasi Nvivo 12 Plus yang menggunakan fitur *Crosstab Map*, Project Map *Analysis* dan *Discourse Analysis*. terdapat 3 proses tahapan, pertama Ncapture website dan artikel. Tahap kedua terdiri dari menganalisis dengan Nvivo 12 Plus untuk menafsirkan teks pada konten yang memiliki arti, kata, dan konteks yang sama yang menghubungkan situs web dan artikel. Tahap ketiga dari analisis wacana adalah analisis dan makna dari konten website dan artikel yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar tidak terjadinya ketimpangan distribusi vaksin antar daerah.

Kata Kunci— Tata Kelola, Vaksin, Kebijakan, Ketimpangan, DKI Jakarta dan Lampung.

I. PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, penyebaran virus Covid-19 di Indonesia membuat berbagai macam masalah muncul, baik dari segi kesehatan hingga perekonomian yang semakin memburuk. Pemerintah harus bekerja keras dan sesegera mungkin mengambil keputusan dalam langkah penangan Covid-19 (Gitiyarko, 2020).

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuat suatu kebijakan untuk menaggulangi dan meminimalisirkan penyebaran Covid-19, dengan menerbitkan berbagai aturan mengenai protokol kesehatan, kampanye cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak secara masif, menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberbagai wilayah hingga penetapan tatanan normal baru (Vincentius, 2020). Penanganan Covid-19 di Indonesia melalui vaksinasi Covid-19 tujuanya untuk membentuk imunitas tubuh pada diri masyarakat dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga pemerintah Indonesia memutuskan pengadaan vaksin Covid-19 harus segera dilakukan sebagai langkah meminimalisir penyebaran virus Covid-19. (Akbar, 2021).

Program vaksinasi yang dilakukan pemerintah saat ini perlu adanya transparansi dari tata kelola vaksinasi Covid-19 sehingga masyarakat dapat memahami dan yakin terhadap kemampuan vaksin dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19 (Humaniora, 2020). Disisi lain masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya menerima program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah sehingga diperlukan pengaturan yang terukur dalam pengaplikasian vaksinasi secara nasional (mpr, 2021).

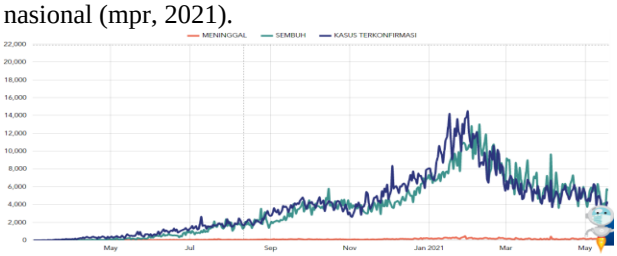

Gambar 1. Kasus Covid-19 di Indonesia (covid19.go.id, 2021)

https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

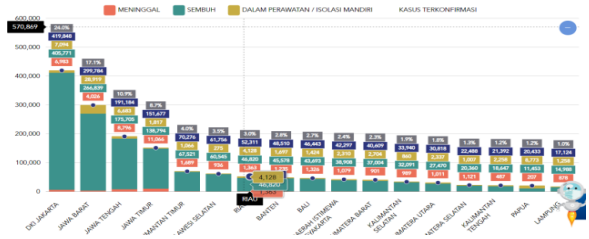

Gambar 2. Kasus Covid-19 di Indonesia (covid19.go.id, 2021)

Pada gambar 1 dan 2 menunjukan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia pada bulan Mei 2021 sebanyak 6,565 jiwa kasus terkonfirmasi, kasus sembuh sebanyak 5,417 jiwa dan kasus meninggal sebanyak 162 jiwa. Berdasarkan data dari satgas Covid-19 laju perkembangan Covid-19 di Indonesia sejak awal Maret 2020 sebanyak 751,270 jiwa, pada bulan Mei 2021 untuk kasus terkonfirmasi sebanyak 1,748,230 jiwa yang ada diseluruh Indonesia(CNN Indonesia, 2021). Angka kasus harian dan kematian akibat Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia, terhitung sejak diumumkan kasus covid-19 pertama kali oleh presiden joko widodo yaitu pada bulan Maret 2020 silam (Ariyanti Saptoyo, 2021).

Berdasarkan data diatas terdapat 10 daerah dengan kasus kematian Covid-19 tertinggi yang diantaranya DKI Jakarta sebanyak 13.465 kasus dan Lampung sebanyak 3.680 kasus (Ariyanti Saptoyo, 2021). Maka dari itu kebijakan vaksin memang menjadi jalan paling rasional untuk terus dilakukan agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 (Dzulfaroh, 2021). Kunci keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 adanya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerena pemerintah daerah langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan vaksinasi Covid-19 (Herdiana, 2020).

Pada konteks ini peran pemerintah daerah memiliki peran utama dalam penerimaan distribusi vaksin covid-19 dimana kebutuhan tersebut sesuai dengan jumlah masyarakat di setiap daerah, serta kesiapan pemerintah daerah dalam mendistribusikan vaksin covid-19 berjalan dengan lancar. Tingkat penerimaan vaksin paling tinggi terdapat di provinsi Papua, Jawa, dan Kalimantan sedangkan untuk penerimaan vaksin lebih rendah terdapat di provinsi Sumatera, Sulawesi, dan Maluku (WHO, 2020). Berikut gambar tingkat penerimaan vaksin Covid-19 per provinsi.

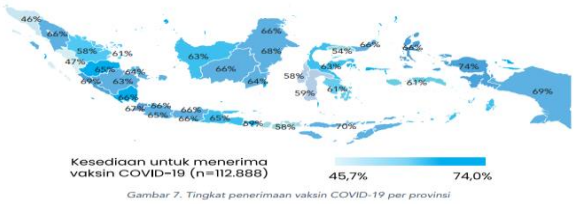

Gambar 3. Kesediaan menerima Vaksin Covid-19 (WHO, 2020)

Pada gambar 3 menunjukan penerimaan vaksin Covid-19 di Indonesia memiliki persentase berbeda sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap daerah seperti daerah DKI Jakarta penerimaan vaksin Covid-19 sebanyak (66%), sementara untuk daerah Lampung penerimaan vaksin Covid-19 sebanyak (66%) (WHO, 2020). Berikut gambar cakupan Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta dan Lampung.

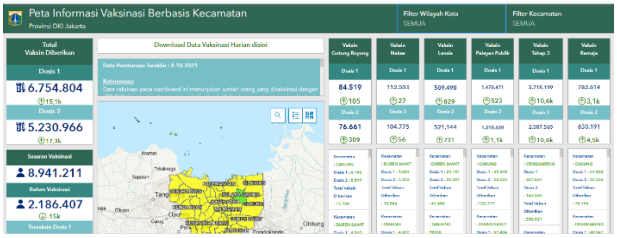

Gambar 4. Peta Infomrasi Vasinasi DKI Jakarta (Dinas Kesehatan Pemprov DKI jakarta, 2021)

Pada gambar 4 menunjukan total cakupan penerimaan vaksinasi di DKI Jakarta dosis 1 sebanyak 6.754.804 jiwa dan dosis 2 sebanyak 5.230.966 jiwa dari sasaran vaksin sebanyak 8.941.211 jiwa dari total jumlah penduduk 11.196.633 jiwa, adapun sasaran vaksinasi yaitu tenaga kesehatan, lansia, pelayanan publik, vaksin tahap 3 dan remaja. Sementara itu yang belum vaksinasi sebanyak 2.186.407 jiwa maka pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakatnya melakukan vaksinasi (Dinas Kesehatan Pemprov DKI jakarta, 2021).

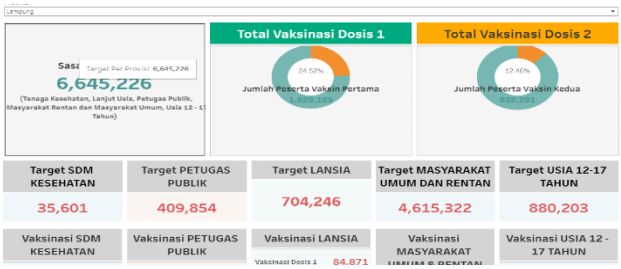

Gambar 5. Penerima Vaksinasi Dosis 1 dan 2 (Vaksinasi, 2021)

Pada gambar 5 menunjukan sasaran penerimaan vaksin Covid-19 di Lampung sebanyak 6,645,226 jiwa dari total jumlah penduduk 9,007,848 (Afriyanto, 2021). untuk penerimaan dosis 1 sebanyak 1,629,189 jiwa dan untuk dosis ke 2 sebanyak 828,291 jiwa, adapun sasaran vaksinasi yaitu SDM Kesehatan, Petugas Publik, Lansia, Masyarakat Umum dan Rentan dan Remaja (Vaksinasi, 2021). Berdasarkan data diatas daerah Lampung menjadi provinsi dengan jumlah vaksinasi terendah dibandingkan dengan DKI Jakarta, perbandingan pencapaian vaksinasi covid-19 pada dosis pertama di DKI Jakarta telah mencapai 104,8 %, sedangkan di Lampung hanya 9,9% (Yahsyi, 2021).

Oleh karena itu Penelitian ini membandingankan DKI Jakrata dengan Lampung karena Lampung merupakan salah satu kota denga cakupan vaksinasi covid-19 terendah didukung dengan data dibawah ini sebagai berikut :

https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

Tabel 1. Data Kasus Covid Jakarta dan Lampung (covid19.go.id, 2021)

Data Kasus Covid-19 di DKI Jakarta	Data Kasus Covid-19 di Lampung
Kasus Terkonfirmasi Covid-19 = 9.129 kasus	Kasus Terkonfirmasi Covid-19 = 687 kasus
Kasus Kematian Covid-19 = 158 kasus	Kasus Kematian Covid-19 = 94 kasus
Cakupan vaksinasi dosis 1 = 6.754.804	Cakupan vaksinasi dosis 1 = 1.629.189
Cakupan vaksinasi dosis 2 = 5.230.966	Cakupan vaksinasi dosis 2 = 828.291

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa selisih dari jumlah cakupan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta dengan Lampung jauh berbeda, cankupan vaksinasi di DKI Jakarta yang mencapai 104,8% sedangkan cakupan vaksinasi di Lampung yang hanya mencapai 9,9%. Percepatan vaksinasi covid-19 sebenarnya tergantung pada kecepatan penyuntikan vaksin per harinya, maka dari itu lambatnya penyuntikan vaksinasi terhadap masyarakat Lampung berdampak pada cakupan vaksinasi covid-19 dan ketersediaan vaksin di daerah Lampung sehingga distribusi vaksin covid-19 terjadi ketimpangan.

Belum meratanya cakupan vaksinasi antar-provisinsi mengakibatkan program pemerintah masih belum berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah harus segera mengubah pola distribusi vaksin dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat mengatasi ketimpangan terkait vaksin Covid-19, dengan terlebih dulu mendata setiap kebutuhan vaksin disetiap daerah serta mengevaluasikan stok vaksin yang tersedia maupun akan kebutuhan vaksin di tanah air (Kiswondari, 2021).

Sesuai dengan keputusan Menteri KesehatanNoHK.01.07/Menkes/12758/2020 jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia adalah Vaksin yang di produksi oleh PT Bio Farma, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, China National Pharmaceutical group Caporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer atau BioNTech dan produk vaksin terakhir yang akan masuk di Indonesia adalah Vaksin Novavax (Azanella Ayu, 2021). Pemberian dosis terhadap jenis-jenis vaksin harus sessuai dengan anjuran kementrian kesehatan.

Dosis untuk vaksin Oxford/AstraZeneca sebanyak 0,5 ml perdosis, Sinovac Research memiliki jumlah dosis 0,5 ml perdosis, Sinophamr memiliki jumlah dosis 0,5 ml perdosis, Moderna memiliki jumlah dosis 0,5 ml perdosis, Pfizer atau BioNTech memiliki jumlah dosis 0,3 ml perdosis, dan vaksin Novavax memiliki jumlah dosis 0,5 ml perdosis (Aeni, 2021). Kunci keberhasilan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dengan adanya transparansi tata kelola vaksinasi, serta aspek transparansi yang menyangkut tentang ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 yang jelas. Maka dari itu berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana tata kelola program vaksinasi Covid-19 di Indonesia dalam mengatasi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 di DKI Jakarta dan Lampung.

II. TIINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Muhammad Taufik Hatta Wibowo dan Ami Afriyani (2021), berjudul *"Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanganan Covid-19 di Kabupatem Sumedang Strategi Kebijakan, Peran Governance Penanganan Covid-19 di Sumedang",* Universitas Pasundan, dipublikasi oleh Research Gate. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif, Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten Sumedang untuk penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dapat ditemukan strategi-kebijakan strategi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang menimbulkan dampak positif yang terlihat dengan adanya tata kelola pemerintahan untuk pegawai di daerah Kabupaten Sumedang (Hatta Wibowo1 & Afriyani, 2021).

Penelitian Rivelino dan Arwanto Harimas Ginting (2020), berjudul *"Tata Kelola Kolaborative dalam Kebijakan Publik dari Perspektifve Penanganan Covid-19 DKI Jakarta",* University Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dipublikasi oleh Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, penelitian ini menggunakan metode teknik purposive sampling dan menggunakan metode triangulasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kerjasama Penprov DKI Jakarta dalam menangani Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tiga tahapan dari proses pemerintahan kolaboratif dalam penanganan penyakit Covid-19 di Jakarta terdapat 5 kriteria keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam governance yang telah terpenuhi yakni accountability/responbility, information sharing dan access to authority. Namun hal ini menunjukan bahwa proses pemerintahan kolaboratif di DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan efektif (Rivelino & Harimas Ginting, 2020).

Penelitian Nisa Khoerunisa dan Faisal Fadila Noorikhsan (2021), berjudul *"Perbandingan tata kelola penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dan India",* Universitas Siliwangi, dipublikasi oleh Garuda, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara koheren. Tujuan penelitian untuk mencoba membandingkan tata kelola pemerintahan pandemi Covid-19 di Indoneisa dan India. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menduduki posisi teratas statistik jumlah kematian akibat Covid-19 di Asia Tenggara walaupun sudah melakukna berbagai macam kebijakan dan sama halnya dengan India yang telah melakukan upaya untuk menekan laju angka Covid-19 dengan pemberlakuan karantina secara ketat namun berimbas kepada ekonomi di India, maka dari itu perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk

https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

dapat menggambil kebijakan yang tepat sasaran (Khoerunisa & Fadilla Noorikhsan1, 2021).

Penelitian RB M. Akbar T.A.P, Diaz Virdani dkk (2021), berjudul *"Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya ",* universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dipublikasi oleh Research Gate, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi. Tujuan penelitian untuk mendeskripsi implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19, ditemui faktor yang mendukung dan penghambatan serta upaya mengatasinya di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 di kota Surabaya pada realitanya menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Surabaya anatara lain realisasi vaksinasi kepada sasaran jauh dari target yang ditetapkan, keengganan calon penerima vaksin menginformasikan penyebab ketidak hadirannya kepada petugas fasilitas kesehatan, kurang aktifnya kelompok sasaran calon penerima vaksin untuk datang sesuai jadwal yang ditetapkan (Akbar & Virdan, 2021).

Penelitian Dian Hardiana (2021) berjudul "*Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid-19: Kajian Konstruksi Penilaian" U*niversitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dipublikasikan oleh Research Gate, penelitian ini menggunakan metode model – building dengan sumber analisis data sekunder. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 dengan fokus kepada kajian konstruksi pedoman untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model pengukuran kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 didasarkan kepada 9 indikator yaitu: konsistensi kebijakan, penyusunan tata kerja, pelatihan SDM, sosialisasi kebijakan, ketersediaan vaksin dan sasaran pendukungnya, kepemimpinan kepala daerah, kapasitas SDM, komunikasi dan koordinasi, ketersediaan anggaran (Herdiana, 2020).

B. Kebijakan Publik

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjukan sebuah perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012).

Menurut Said Zainal Abidin kebijakan merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan yang berkaintan dengan tujuan, nilai, dan praktik (Herabudin, 2016). Pada hakekatnya kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan serta memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan yang tertentu untuk dilakukan oleh pemerintah serta bukan dari keputusan yang berdiri sendiri. (Aristin & Nur Azizah, 2018)

Menurut (Subarsono, 2015) kebijkan publik merupakan sebagai kebijakan yang dapat ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Sedangkan menurut (Aristin & Nur Azizah, 2018) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi yang untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat, pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, serta untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut (Tahir, 2014) kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen yang diantaranya sebagai berikut:

1. Goal atau tujuan yang diinginkan
2. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan
3. Programs, yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
4. Decisions atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
5. Efec, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Dari pengertian diatas maka dapat simpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dunia nyata seperti masalah sosial dalam menjalankan program, sehingga tercapainya kesejahteraan sosial dan strategi yang berorientasi pada tujuan negara.

C. Good Governance (Tata Kelola)

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan menggunakan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien. Dalam tata kelola pemerintahan atau yang disebut dengan good governance tidak hanya melakukan pengelolaan pada lembaga pemerintahan, namun menyangkut pada semua lembaga baik dari lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (Kamaluddin, 2020).

Menurut (Kamaluddin, 2020) good governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik maupun pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut (Kharisma, 2014) good governance dicetuskan oleh Word Bank yang memiliki arti sebagai program pengelolaan sektor publik, dalam rangka penciptaan ketata pemerintahan yang baik serta dalam kerangka persyaratan bantuan pada pembangunan.

Maka dari itu untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yang diantaranya adalah adanya faktor kepemimpin yang sebagai bagian penggerak perubahan, organisasi pemerintah yang sebagai katalisator perubahan, dan kebijakan pemerintah yang merusak perubahan direvisi kembali agar lebih memihak pada perubahan (Andhika, 2017).

Adapun Menurut (Kamaluddin, 2020) bahwa prinsip-prinsip good governance terdiri dari:

1. Akuntabilitas
2. Keterbukaan dan transparan (*openess and transparency*)
3. Ketaatan pada aturan hukum

https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bawa good governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham atau cara pemerintah dalam megelola sumber daya sosial maupun ekonomi yang bertujuan untuk kepetingan pembangunan masyarakat.

Dampak berbahaya dari Covid-19 adalah meningkatnya jumlah kematian yang terjadi di Indonesia, sehingga kebutuhan vaksin sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi penularan Covid-19. Keamanan dan efektivitas menjadi hal yang utama yang perlu diperhatikan dalam perkembangan vaksin pada tahap uji coba pra klinis dan klinis.

Vaksin merupakan sediaan biologi yang dapat menimbulkan suatu kekebalan terhadap penyakit, yang didalamnya terkandung sejumlah bahan kecil yang menyerupai organisme patogen yang mampu menginduksi suatu sistem imun. Sedangkan untuk vaksinasi merupakan tindakan pemberian suatu vaksin (Dwi Lestari & Raveinal, 2020).

Vaksin merupakan cara yang paling ampuh untuk melakukan pencegahan Covid-19, manfaat dari vaksin itu sendiri adalah untuk mengurangi penularan covid-19 serta menurunkan angka kematian yang dapat disebebkan oleh virus Covid-19. Dengan melakukan vaksinasi masyarakat akan membentuk kekebalan imun tubuh sehingga mampu melindungi masyarakat dari penularn virus covid-19. Oleh karena itu vaksinasi meruapakan bagian terpenting dari penanganan wabah Covid-19 (Sinta, 2021).

Dalam penggunaan vaksin harus memenuhi beberapa faktor yang aman untuk digunakan, diantaranya adalah unsur keamanan, khasiat, serta kualitas yang sudah terjamin. Pemberian vaksin kepada masyarakat indonesia sebagai upaya memutus penularan covid-19, dengan ini pemerintah memilih Sinovac Biotech Ltd, PT Bio Farma, dan Oxford/AstraZeneca, sebagai vaksin yang digunakan di indonesia.

Selain itu vaksin tersebut sudah melalui uji klinis tahap 3 dan telah mendapatkan persetujuan serta rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan di Indoneisa sudah melakukan tahap uji vaksin oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan dinyatakan lolos uji. Sehingga unsur keamanan, khasiat, serta kualitas dari vaksin tersebut sudah diuji sesuai dengan prosedur yang ketat (Sinta, 2021).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola program vaksinasi Covid-19 di Indonesia dalam mengatasi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 di DKI Jakarta dan Lampung dengan (studi pendekatan analisis media massa). Adapun fokus pada penelitian ini mengenai tata kelola program vaksinasi covid-19 serta ketimpangan distribusi Covid-19 yang terjadi di DKI Jakarta dan Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisis deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan dengan analisis content media massa dan interpretasi teks dengan situasi dan fenomena yang terjadi. Content analysis dilakukan melalui beberapa media mpr.go.id, mediaindonesia.com, kompas.com, kemkes.go.id, idxchanel.com dan cnnindonesia.com.

Penelitian ini menggunakan aplikasi *software Nvivo 12 plus.* Pada teknik analisis data menggunakan Aplikasi *Nvivo 12 Plus,* penelitian ini menggunakan fitur crosstab analysis, concept map analysis, dan text research analysis(Brandão, 2015). Teknik pengumpulan data berupa artikel jurnal atau website yang relevan dan bereputasi dalam memberikan informasi berita mengenai pembahasan terkait Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dalam Mengatasi Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19 di DKI Jakarta dan Lampung.

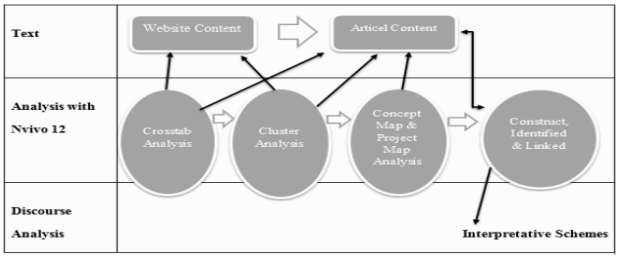

Gambar 6. Tahapan Penelitian dan Analisis Sumber **:** (Fajri dkk., 2020)

Berdasarkan proses tahapan dalam analisis aplikasi Nvivo 12 Plus yang pertama ada text. *Text* merupakan pengumpulan suatu data melalui website content atau article content yang relevan untuk digunakan sebagai data penelitian. Kedua, *analysis with Nvivo 12 plus* ada 4 proses tahapan. *Crosstab Analysis* merupakan metode analisis dengan proses pembuatan tabel kontigensi dan menyajikan data variabel yang relevan kedalam format matriks. *Cluster Analysis* digunakan untuk menvisualisasikan dan mengumpulkan data variabel yang memiliki kesamaan dan perbedaan dari beberapa website content atau article content yang relevan.

Concept Map merupakan untuk memetakan data variabel atau ide-ide untuk mengeksplorasi dan menyajikan hubungan dalam data variabel secara visualisasi bentuk bebas yang terdiri dari beberapa bentuk dan penghubung. *Project Map Analysis* merupakan respresentasi grafis dari berbagai item yang telah dibuat dalam penelitian. Tahap ini membuat peta analisis dari coding, case, dan data sumber terikat untuk menampilkan alur proses data dan hubungan tiap data yang telah dilakukan. *Construct Indentified and Linked* merupakan pemetaan berdasarkan struktur dari beberapa data yang sudah dipilih sebelum dijadikan proses analisis dan pemaknaan kata. Terakhir *Discourse Analysis* merupakan analisis dan makna dari setiap kata terkait dalam website atau article content yang relevan, dan kemudian digunakan sebagai data penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mencapai herd immunity di masa pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menekankan lajunya penyebaran Covid-19 salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

yaitu program vaksinasi Covid-19 yang dapat diyakini sebagai salah satu harapan global dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Program Vaksinasi menjadi angin segar dalam mengendalikan Covid-19, namun kenyataanya hingga saat ini masih menjadi prokontra dikalangan masyarakat terhadap khasiat dan keamanan vaksin pada tubuh manusia, sehingga banyak yang dari kalangan kontra vaksinasi Covid-19 menolak untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19.

Hambatan program vaksinasi Covid-19 tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat yang menolak vaksin, tetapi juga keterbatasan stok vaksin hingga ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 di berbagai daerah salah satunya DKI Jakarta dan Lampung. Pada dasarnya kecepatan program vaksinasi nasional bergantung pada kecepatan vaksinasi daerah, namun hal ini sangat sulit tercapai karena distribusi sumber daya kesehatan dan tenaga kesehatan yang tak seimbang di sejumlah provinsi. Maka dari itu pemerintah harus segera merubah pola distribusi vaksin yang dilakukan selama ini serta bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan terkait vaksin Covid-19 (Surianta, 2021). Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi program vaksinasi Covid-19 dalam mengatasi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 di DKI Jakarta dan Lampung.

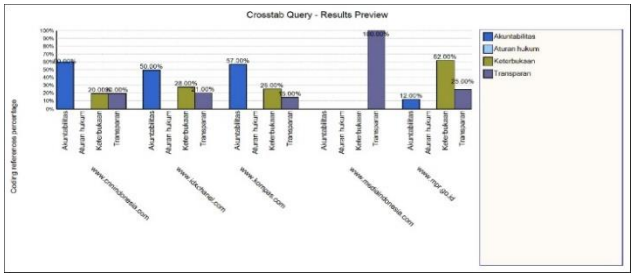

Grafik 7. Faktor yang mempengaruhi
Sumber: (*Crosstab Analysis with Nvivo 12 Plus, 2021*)

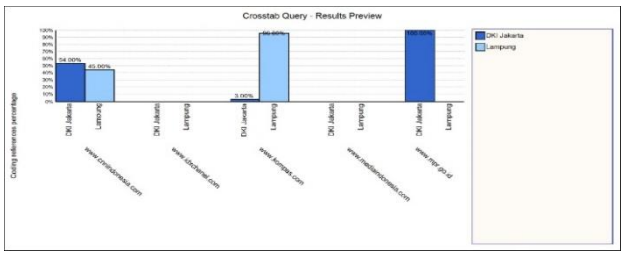

Grafik 8. Faktor yang mempengaruhi
Sumber: (*Crosstab Analysis with Nvivo 12 Plus, 2021*)

Berdasarkan grafik diatas bahwa dalam pengadaan vaksin Covid-19 perlu memperhatikan tata kelola pengadaan vaksin Covid-19 yang jelas dan transparan. Berdasarkan data diatas beberapa indikator memiliki nilai yang sangat penting dalam mengatasi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19. *Pertama*, aturan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, pada keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku pada suatu kehidupan bersama yang dipaksakan pelaksanaannya dengan saksi (Riwanto, 2019).

Kedua Akuntabilitas, menurut (Agustiawan & Halim, 2018) akuntabilitas merupakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban. Suksesnya program vaksinasi Covid-19 perlu adanya pengawasan dan keterbukaan terhadap pelaksanaan vaksinasi yang terus dikawal oleh seluruh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), baik dari tingkat kementrian dan lembaga maupun pemerintah daerah. Maka dari itu pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mengacu terhadap Peraturan Presiden No. 99/2020 yang tertuju pada sasaran pengawasan yang diantaranya yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi (Alia Putra, 2021).

Ketiga keterbukaan, keterbukaan dalam akses informasi mengenai informasi publik merupakan hak masayarakat yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. Keterbukaan informasi bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang demokratis, baik dan bersih. Maka dari itu, akses masyarakat terhadap informasi harus lebih dioptimalkan. Khususnya di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini untuk memberikan informasi dan pentingnya mengenai vaksin Covid-19 sehingga masayarakat dapat menyakini terhadap kebenaran dan khasiat vaksin Covid-19 bagi tubuh kita. Pentingnya keterbukaan informasi publik untuk menekankan informasi atau pesan untuk membentuk perilaku publik dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 dan tercapainya program vaksinasi Covid-19 (Mandasari, 2021)

Keempat Transparan, menurut (Bayquni & Santoso, 2021) transparansi dapat diartikan sebagai hak publik atas informasi dan akses terhadap informasi, sedangkan di sisi lain, Negara harus menjamin bahwa semua orang dapat menjalankan haknya yang sama tanpa diskriminasi. Transparansi menyiratkan keterbukaan pemerintah terhadap data, komunikasi dan akuntabilitas yang valid, benar dan akuntabilitas Negara. Dalam situasi darurat Covid-19 khususnya, transparansi data menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan oleh negara.

Dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 menjadi hal penting untuk mensukseskan program yang dijalankan oleh pemerintah dengan memastikan ketepatan distribusi dan pemberian vaksin yang tepat sasaran dan akuntabel. Maka dari itu yang harus dilakukan yaitu transparan dalam hal pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksinasi, pendanaan vaksin, dukungan serta fasilitas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu kementrian kesehatan harus mengatur dalam penerimaan vaksin Covid-19 dan dibutuhkan kerjasama distribusi vaksin dan pelaksanaan dari semua pihak (Bayquni & Santoso, 2021).

Vaksin menurut kementrian kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi adalah produk biologi yang berisis antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, yang masih utuh atau bagiannya atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid

https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu (Purnomo & Suharto, 2021).

Vaksinasi merupakan salah satu cara yang paling efektif sebagai langkah pencegahan penularan virus Covid-19, maka dari itu pemerintah terus memastikan ketersediaan vaksin dan bekerja keras dalam mendistribusikan vaksin ke daerah-daerah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19. Pemerintah menegaskan bahwa semua merek vaksin yang ada di Indonesia aman dan efektif melawan Covid-19, beberapa vaksin telah tiba di Indonesia yang diantaranya Sinovac, Astrazenaca, Sinopharm, Moderna dan Pfizer. Menurut kementrian kesehatan total vaksin yang dibutuhkan sebanyak 426 juta dosis namun yang tersedia di Indonesia sebanyak 130 juta dosis vaksin, dari 130 juta dosis vaksin pemerintah telah mendistribusikan ke seluruh daerah sebanyak 68 juta dosis. Sebanyak 50 persen dosis vaksin Covid-19 telah didistribusikan di tujuh provini dengan kasus Covid-19 tertinggi yang diantaranya di Pulau Jawa dan Bali dan sisanya disebar ke 27 Provinsi di luar Jawa dan Bali (Ari Wibowo, 2021).

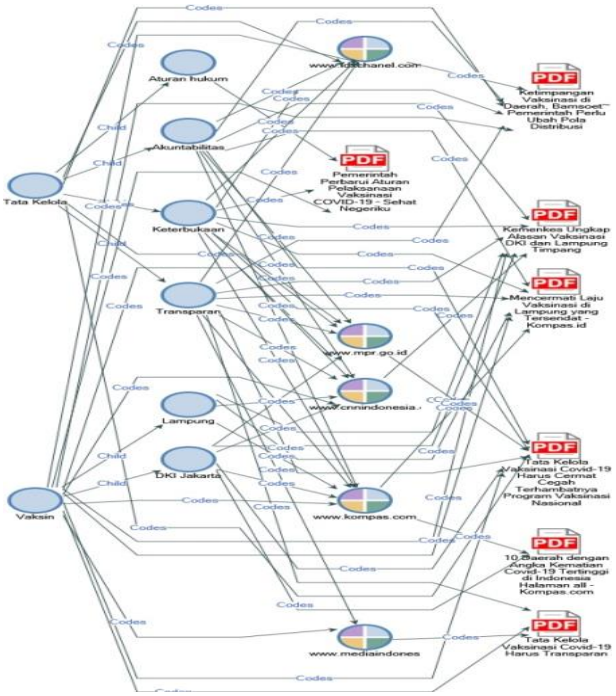

Gambar 9. Project Map
Sumber: (*Project Map with Nvivo 12 Plus 2021*)

Kapasitas produksi vaksin yang terbatas berpengaruh terhadap pasokan vaksin yang ada, sehingga pemerintah terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional (COVID-19, 2021). Namun fakta yang terjadi dilapangan pemerintah menetapkan beberapa daerah prioritas dengan kasus Covid-19 yang sangat tinggi dalam setiap tahap pelaksanaan vaksinasi maka dari itu pemenuhan kebutuhan vaksin disetiap daerah masih belum merata, menurut kementrian kesehatan alasan distribusi vaksin Covid-19 belum merata dikarenakan adanya keterbatasan stok serta teknis produksi di dalam negeri.

Berdasarkan data kementrian kesehatan cakupan vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta dosis 1 sebanyak 6.754.804 jiwa dan dosis 2 sebanyak 5.230.966 jiwa dari sasaran vaksin sebanyak 8.941.211 jiwa dari total jumlah penduduk 11.196.633 jiwa. Cepatnya vaksinasi di DKI Jakarta disebabkan kasus yang sangat tinggi, DKI Jakarta merupakan pusat Ibu Kota Negara, program vaksinasi di DKI Jakarta tidak mengharuskaan KTP DKI dan didorong oleh urgensi untuk menghidupkan kembali sektor ekonomi di Ibu Kota (Afriyanto, 2021).

Sementara daerah Lampung cakupan vaksinasi Covid-19 pada dosis 1 sebanyak 1.629.189 jiwa dan untuk dosis ke 2 sebanyak 828,291 jiwa dari sasaran vaksin sebanyak 6.645.226 jiwa dari total jumlah penduduk 9,007,848 jiwa. Rendahnya cakupan vaksinasi di Lampung disebabkan kurangnya tenaga kesehatan dan lambatnya dalam penyuntikan vaksin Covid-19 maka ketersedian vaksin Covid-19 di daerah tetap tidak memberikan perlindungan maksimal pada warga serta kecepatan dalam penyuntikan vaksin Covid-19 nantinya akan dipertimbangkan distribusi vaksin Covid-19 yang banyak untuk daerah Lampung (Yahsyi, 2021).

Maka dari itu ketimpangan vaksinasi di Indonesia masih terjadi dibeberapa daerah, karena pemerintah terfokus pada daerah yang memiliki jumlah kasus yang tinggi. Ketimpangan vaksin juga dapat diakibatkan sebaran vaksinator corona yang masih belum merata, kesiapan logistik di puskesmas masih belum mendukung program vaksinasi yang mengakibatkan program vaksinasi Covid-19 di setiap daerah tidak berjalan dengan baik, oleh karena itu pemerintah harus merubah pola distribusi vaksinasi Covid-19, perlu adanya kerjasama antar sektor swasta dalam vaksinasi Covid-19 dan mengevaluasi kebijakan dasar distribusi vaksin agar menghilangkan hambatan geografi atau menghilangkan ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 yang terjadi di Indonesia (Surianta, 2021).

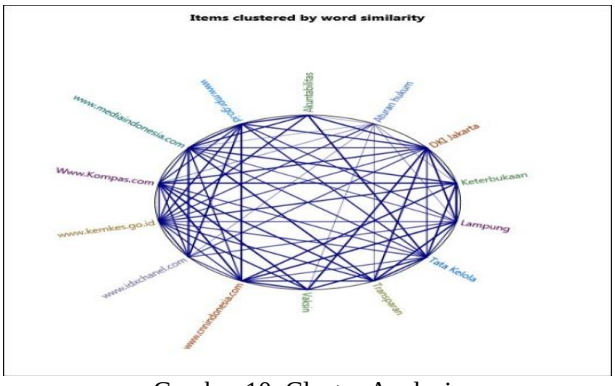

Gambar 10. Cluster Analysis
Sumber: (*Cluster Analysis with Nvivo 12 Puls 2021*)

Berdasarkan gambar di atas, analisis klaster di atas menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola program vaksinasi Covid19 di Indonesia untuk mengatasi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 DKI Jakarta dan Lampung. Terdapat 2 variabel yaitu yang

https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

pertama tata kelola dengan indikator akuntabilitas, aturan hukum, keterbukaan dan transparan. Yang kedua Vaksin, Jakarta dan Lampung, gambar di atas menunjukkan adanya kesamaan isi dari berbagai media website yang dibentuk dengan masing-masing media yang terhubung antara jumlah garis penghubung. Website media online yaitu website www.mpr.go.id, www.mediaindonesia.com, www.kompas.com, www.kemkes.go.id, www.idxchanel.com, www.cnnindonesia.com. memiliki jumlah garis penghubung yang sama yang menampilkan konten masing-masing media untuk berbagi narasi dan opini tentang tata kelola program vaksinasi Covid19 di DKI Jakarta dan Lampung dalam Mengatasi Ketimpangan di distribusi produksi vaksin Covid-19.

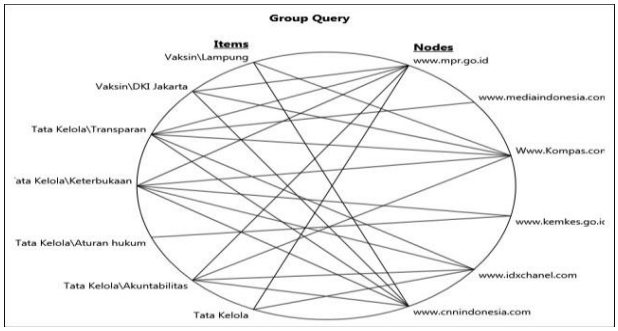

Gambar 11. Group Query
Sumber*: (Group Query with Nvivo 12 Plus, 2021)*

Dari gambar 4 diatas data diolah menggunakan Group Query dimana menganalisis media konten website www.mpr.go.id, www.mediaindonesia.com, www.kompas.com, www.kemkes.go.id, www.idxchanel.com, www.cnnindonesia.com. Dari variabel tersebut adanya dipengaruhi beberapa indikator yang diantaranya Variabel pertama yaitu tata kelola seperti akuntabilitas, aturan hukum, keterbukaan dan transparan, sehingga tata kelola merupakan awal terbentuknya suatu faktor yang dapat mempengaruhi faktor lainnya. variabel kedua adalah vaksin, Jakarta dan Lampung. Berdasarkan pada data, variabel kedua merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil keseluruhan. Dari variabel-variabel masalah tersebut dapat dibentuk keterkaitan antara variabel pertama dan kedua yang dapat saling mempengaruhi.

V. KESIMPULAN

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Coronavirus baru yaitu Sars-Cov-2, penyebab virus Covid-19 di Indonesia membuat berbagai macam masalah muncul, baik dari segi kesehatan hingga perekonomian yang semakin memburuk. Penanganan Covid-19 di Indonesia melalui vaksinasi tujuannya untuk membentuk imunitas tubuh pada diri masyarakat dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga pemerintah Indonesia memutuskan pengadaan vaksin Covid-19 harus segera dilakukan sebagai langkah meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

Berbagai macam hambatan dan faktor-faktor permasalahan dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 serta ketimpangan distribusi vaksin di Indonesia yang menyebabkan tidak berjalan dengan cepat dan tepat sasaran yang diantaranya yaitu stok vaksin nasional yang terbatas, pemerintah terfokus pada daerah yang memiliki jumlah kasus yang tinggi, disebabkan sebaran vaksinator Covid-19 yang masih belum merata, kurangnya sumber daya manusia dalam penyuntikan vaksin Covid-19 pada daerah-daerah pelososk, perlu adanya kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pendistribusian vaksinasi dan kesiapan logistik di puskesmas masih belum mendukung program vaksinasi yang mengakibatkan pelaksanaan vaksinasi ditiap di daerah tidak berjalan dengan baik.

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi pada tata kelola program vaksinasi dalam mengatasi ketimpangan distribusi vaksin tiap daerah diakibatkan stok vaksin Covid-19 yang terbatas sehingga distribusi vaksin tiap daerah berbeda, tata kelola pemerintah daerah yang masih belum struktur secara baik dalam pelaksanaan vaksinasi dan perlu adanya evaluasi kebijakan distribusi vaksin serta kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan agar pemerintah harus merubah pola distribusi vaksinasi Covid-19, perlu adanya kerjasama antar sektor swasta dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan mengevaluasi kebijakan dasar distribusi vaksin untuk menghilangkan hambatan geografi atau menghilangkan ketimpangan distibusi vaksin Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, N. S. (2021, Juli 2). *7 Jenis Vaksin Covid-19 yang Ditetapkan oleh Menkes—Nasional Katadata.co.id*. katadata.co.id. https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60decbce52146/7-jenis-vaksin-covid-19-yang-ditetapkan-oleh-menkes

Afriyanto, D. (2021, September). *Mencermati Laju Vaksinasi di Lampung yang Tersendat—Kompas.id*. https://www.kompas.id/baca/riset/2021/09/30/mencermati-laju-vaksinasi-di-lampung-yang-tersendat/

Agustiawan, & Halim, A. (2018). *Jurnal Akutansi dan Ekonomi*. *8*, 9.

Akbar, I. (2021). *Vaksinasi Covid 19 Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik*. *4*, 11.

Akbar, & Virdan, D. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Research Gate*, *4*, 10.

Alia Putra, N. (2021, Januari). *BPKP: Perlu menjaga akuntabilitas anggaran vaksin Covid-19*. https://www.alinea.id/. https://www.alinea.id/bisnis/bpkp-perlu-menjaga-akuntabilitas-anggaran-vaksin-covid-19-b2cw690yQ

https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

Andhika, L. R. (2017). *Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government*. *8*, 16.

Ari Wibowo, E. (2021, Juli). *2 Alasan Distribusi Vaksin Covid-19 Belum Merata—Nasional Tempo.co*. https://nasional.tempo.co/read/1487322/2-alasan-distribusi-vaksin-covid-19-belum-merata

Aristin, R., & Nur Azizah, R. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. *media.neliti.com*, *8*, 16.

Ariyanti Saptoyo, D. R. (2021, September). 10 daerah dengan angka kematian Covid-19 tertinggi di Indonesia. *Kompas.com*. https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/19/140000465/10-daerah-dengan-angka-kematian-covid-19-tertinggi-di-indonesia?page=all

Azanella Ayu, L. (2021, Januari). 5 Perkembangan Terkini Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Kompas.com*. https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/03/091400265/5-perkembangan-terkini-vaksinasi-covid-19-di-indonesia?page=all

Bayquni, B., & Santoso, P. Y. (2021). Postkomodifikasi Portal Berita Di Kompas.Com Pada Pemberitaan Vaksin Covid-19. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, *20*(1). https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1325

Brandão, C. (2015). P. Bazeley and K. Jackson, *Qualitative Data Analysis with NVivo* (2nd ed.): (2013). London: Sage. *Qualitative Research in Psychology*, *12*(4), 492–494. https://doi.org/10.1080/14780887.2014.992750

CNN Indonesia. (2021, Januari 1). Awal tahun 2021 kasus covid tambah 8.072 total 751.270. *cnnindonesia.com*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210101135742-20-588485/awal-tahun-2021-kasus-covid-tambah-8072-total-751270

COVID-19, W. R. P. (2021, Agustus). *Percepatan Vaksinasi Didukung Jalur Distribusi "Rantai Dingin" Hingga Pelosok 34 Provinsi—Berita Terkini*. covid19.go.id. https://covid19.go.id/p/berita/percepatan-vaksinasi-didukung-jalur-distribusi-rantai-dingin-hingga-pelosok-34-provinsi

covid19.go.id. (2021, Mei). Peta Sebaran Covid-19. *Covid19.go.id*. https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19

Dinas Kesehatan Pemprov DKI jakarta. (2021). Dashboard cakupan vaksinasi fasilitas kesehatan di kecamatan. *corona.jakarta.go.id*. https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi

Dwi Lestari, L., & Raveinal. (2020). *Travel Vaccine*. *5*, 10.

Dzulfaroh, A. N. (2021, Juni). Daftar 10 daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. *Kompas.com*. www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/060600965/daftar-terbaru-10-daerah-dengan-kasus-covid-19-tertinggi-di-indonesia?page=all

Fajri, U. A., Sarofah, R., Fadli, Y., & Suryatman, A. G. (2020). *Mass Media Analysis: Contribution of Millennials in the Success of the 2019 Election in Indonesia*. *7*(3), 15.

Gitiyarko, V. (2020, Juni 22). Upaya dan kebijakan pemerintah indonesia menangani pandemi covid-19. *kompas.id*. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19

Hatta Wibowo1, M. T., & Afriyani, A. (2021). Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sumedang. *journal.unpas.ac.id*, *12*, 14.

Herabudin. (2016). *Studi kebijakan pemerintah dari filosofi ke implementasi*. CV Pustaka Setia.

Herdiana, D. (2020). kapsitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi covid-19: Kajian kontruksi penilaian. *Universitas Brawijaya*, 23.

Humaniora. (2020, Oktober). Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan. *Mediaindonesia.com*. https://mediaindonesia.com/humaniora/352841/tata-kelola-vaksinasi-covid-19-harus-transparan

Kamaluddin, S. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang*. 7.

Kharisma, B. (2014). *Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)*. *19*, 22.

Khoerunisa, N., & Fadilla Noorikhsan1, F. (2021). Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India. *garuda*, *2*, 13.

Kiswondari. (2021, Agustus). Ketimpangan Vaksinasi di Daerah, Bamsoet: Pemerintah Perlu Ubah Pola Distribusi. *idxchannel.com*. https://www.idxchannel.com/economics/ketimpangan-vaksinasi-di-daerah-bamsoet-pemerintah-perlu-ubah-pola-distribusi

Mandasari, R. (2021, September). *Transformasi-Digitalisasi Informasi, Kunci Optimalisasi Keterbukaan Informasi*. Rri.Co.Id. https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1206008/transformasi-digitalisasi-informasi-kunci-optimalisasi-keterbukaan-informasi

mpr. (2021, Mei). Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Cermat Cegah Terhambatnya Program Vaksinasi Nasional. *mpr.go.id*. https://www.mpr.go.id/berita/Tata-Kelola-Vaksinasi-Covid-19-Harus-Cermat-Cegah-Terhambatnya-Program-Vaksinasi-Nasional

https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

Purnomo, C. I., & Suharto, G. (2021). *Vaksinasi SARS-CoV-2 dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. *48*, 6.

Rivelino, & Harimas Ginting, A. (2020). Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektive Penanganan Covid -19 DKI Jakarta. *ejournal.ipdn.ac.id*, *13*, 15.

Riwanto, A. (2019). *Konsep Dasar Hukum* (No. SKOM4439; hlm. 33).

Sinta, T. (2021). *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. *5*(2), 9.

Subarsono, A. (2015). *Analisis kebijakan publik konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Surianta, A. (2021). Bekerja Sama Melawan Pandemi Meningkatkan Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Repository.cips*, *41*, 38.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. ALFABETA, CV.

Vaksinasi, P. (2021). Vaksinasi COVID-19 Provinsi. *vaksin.kemenkes.go.id*. https://vaksin.kemkes.go.id/#/provinces

Vincentius, G. (2020, Desember 20). Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Semester II 2020. *kompas.id*. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020

WHO. (2020). Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia. *Covid19.go.id*, 26.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik (teori, proses dan studi kasus)*. CAPS.

Yahsyi, A. (2021). Kemenkes Ungkap Alasan Vaksinasi DKI dan Lampung Timpang. *cnnindonesia.com*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210813135617-20-679966/kemenkes-ungkap-alasan-vaksinasi-dki-dan-lampung-timpang